

SINKRONISASI KEBIJAKAN PERTAHANAN DALAM OPERASI MILITER DENGAN HAK ASASI MANUSIA

SYNCHRONIZING DEFENSE POLICY IN MILITARY OPERATIONS WITH HUMAN RIGHTS

Aris Sarjito¹

Universitas Pertahanan
Republik Indonesia¹

email:

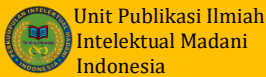
arissarjito@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlunya kebijakan pertahanan untuk memasukkan hak asasi manusia ke dalam operasi militer, mengidentifikasi tantangan etika, meningkatkan kesadaran personel, menetapkan kerangka akuntabilitas, dan menjajaki kolaborasi internasional untuk sinkronisasi. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, memanfaatkan data sekunder, untuk menganalisis literatur dan studi kasus yang ada mengenai kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia, mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan. Hasil penelitian ini menyoroti peran penting kebijakan pertahanan dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia selama operasi militer. Laporan ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan etis utama yang dihadapi oleh kekuatan militer dalam mengintegrasikan hak asasi manusia, seperti menyeimbangkan keamanan dengan hak-hak individu dan menanggapi dinamika konflik yang berubah dengan cepat. Selain itu, studi ini akan mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan militer guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan personel. Lebih jauh lagi, penelitian ini akan menekankan perlunya kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif untuk menjamin akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi militer. Terakhir, studi ini akan mengeksplorasi pentingnya kolaborasi dan kerja sama internasional dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia, termasuk pertukaran praktik terbaik dan penetapan standar bersama. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana kebijakan pertahanan dapat secara efektif mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam operasi militer. Dengan mengatasi urgensi, tujuan, dan tantangan etika, penelitian ini akan berkontribusi dalam mendorong pendekatan yang lebih etis dan bertanggung jawab terhadap penempatan militer.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kebijakan Pertahanan, Kolaborasi Internasional, Operasi Militer, Tantangan Etika.

Abstract: The research aims to examine the need for defense policies to incorporate human rights into military operations, identify ethical challenges, enhance personnel awareness, establish accountability frameworks, and explore international collaboration for synchronization. The study will utilize qualitative research methods, utilizing secondary data, to analyze existing literature and case studies on defense policy and human rights, identifying gaps and challenges. The research results will highlight the crucial role of defense policy in promoting and protecting human rights during military operations. It will identify key ethical challenges faced by military forces in integrating human rights, such as balancing security with individual rights and responding to rapidly changing conflict dynamics. Additionally, the study will propose recommendations to improve military training and

JGPI
p-ISSN: 2774-907X
e-ISSN: 2775-0140
Vol. 3, No. 2, pp. 17-41
Oktober 2023



education to raise awareness and understanding of human rights among personnel. Furthermore, the research will emphasize the necessity of a comprehensive legal and institutional framework to ensure accountability for human rights violations in military operations. Lastly, the study will explore the significance of international collaboration and cooperation in synchronizing defense policies with human rights, including the exchange of best practices and the establishment of common standards. Can be concluded that research aims to provide valuable insights into how defense policies can effectively integrate human rights considerations into military operations. By addressing the urgency, objectives, and ethical challenges, this study will contribute to fostering a more ethical and responsible approach to military deployments.

Keywords: *Defense Policy, Ethical Challenges, Human Rights, International Collaboration, Military Operations*

PENDAHULUAN

Sinkronisasi kebijakan pertahanan dalam operasi militer dengan hak asasi manusia telah menjadi aspek penting dalam hubungan internasional, kajian keamanan, dan paham kemanusiaan. Meningkatnya keterhubungan global menuntut negara-negara menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan pertimbangan etis (Yamashita, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya dan relevansi sinkronisasi ini, menekankan pentingnya hal ini dalam mempromosikan perdamaian global, menghormati hak-hak individu, dan menjaga norma-norma internasional. Dengan mengeksplorasi titik temu antara kebijakan pertahanan, hak asasi manusia, hubungan internasional, studi keamanan, dan paham kemanusiaan, kita dapat memperoleh pemahaman komprehensif tentang keterhubungan dan tujuan bersama.

Dalam bidang hubungan internasional, sinkronisasi kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia memperkuat komitmen suatu negara terhadap nilai-nilai bersama, kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain (Donelli, 2023). Sinkronisasi seperti ini mendorong dialog dan diplomasi, sehingga menghasilkan penyelesaian konflik yang lebih damai. Dengan memprioritaskan hak asasi manusia sebagai komponen inti kebijakan pertahanan, negara-negara dapat menumbuhkan kepercayaan dan membangun kemitraan yang dapat diandalkan dengan negara-negara lain. Pendekatan ini membantu memajukan keamanan kolektif dan mengatasi tantangan transnasional, seperti terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, dan ancaman dunia maya. Dalam bidang studi keamanan, sinkronisasi kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia mengakui bahwa keamanan tidak boleh hanya berfokus pada perlindungan integritas teritorial tetapi juga harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan individu

(Valayden, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan pertahanan harus memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk melindungi warga negara baik secara nasional maupun internasional. Dengan mempertimbangkan implikasi tindakan pertahanan terhadap hak asasi manusia, para pembuat kebijakan dapat mengurangi risiko jatuhnya korban sipil dan pengungsian, yang dapat memicu kebencian dan ekstremisme, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan dan stabilitas. Dalam bidang studi kemanusiaan, sinkronisasi kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia sangat penting dalam upaya kemanusiaan, di mana angkatan bersenjata sering kali dikerahkan untuk merespons bencana alam, konflik, atau melindungi kelompok rentan. Dengan memiliki pemahaman dan komitmen yang jelas terhadap hak asasi manusia, operasi militer dapat mengurangi dampak buruk terhadap warga sipil dan berupaya secara aktif melindungi dan memajukan hak-hak mereka (Abrahamsen & Sandor, 2018). Kebijakan pertahanan harus mencakup pedoman yang menekankan pada minimalisasi kerusakan tambahan, menghormati martabat individu, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum humaniter. Sinkronisasi ini menunjukkan komitmen suatu negara terhadap bantuan kemanusiaan dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan adil.

Sinkronisasi kebijakan pertahanan dalam operasi militer dengan hak asasi manusia merupakan aspek yang sangat diperlukan dalam hubungan internasional, kajian keamanan, dan kemanusiaan (Cook & Yogendran, 2021). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan pertahanan, negara-negara dapat menavigasi kompleksitas tantangan global dengan lebih efektif, membangun kemitraan yang dapat diandalkan berdasarkan nilai-nilai bersama, dan memastikan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia akan menjunjung tinggi norma-norma internasional dan berkontribusi terhadap tatanan dunia yang saling menghormati, adil, dan aman. Sangatlah penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi untuk menyadari pentingnya dan relevansi sinkronisasi ini, bekerja sama untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia dengan cara yang memajukan perdamaian dan melindungi kepentingan negara dan individu.

Urgensi penelitian mengenai sinkronisasi kebijakan pertahanan dalam operasi militer dengan hak asasi manusia sangatlah tinggi. Penelitian ini membahas kebutuhan penting untuk memastikan bahwa tindakan militer dilakukan dengan cara yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia, sehingga meminimalkan kerugian

dan kerusakan tambahan yang tidak perlu, yakni Meminimalkan korban sipil: Sinkronisasi kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia sangat penting untuk meminimalkan korban sipil selama operasi militer. Penting untuk mengembangkan strategi, aturan keterlibatan, dan protokol yang memprioritaskan perlindungan warga sipil dan meminimalkan kerugian bagi non-kombatan, Menjunjung tinggi kewajiban hukum internasional: Penelitian mengenai sinkronisasi kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia sangatlah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap instrumen dan kewajiban hukum internasional. Hal ini termasuk mematuhi perjanjian seperti Konvensi Jenewa dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, yang menetapkan pedoman pelaksanaan operasi militer dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi: Dengan menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia, penelitian dapat berkontribusi dalam menciptakan aparat militer yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini melibatkan penerapan mekanisme untuk menyelidiki, melaporkan, dan menangani potensi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan militer selama operasi. Langkah-langkah akuntabilitas tersebut membantu menjaga kepercayaan publik dan menjamin keadilan bagi para korban, Memperkuat efektivitas militer: Menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia juga dapat berkontribusi pada efektivitas operasi militer secara keseluruhan. Dengan memasukkan pertimbangan hak asasi manusia, pasukan militer dapat meminimalkan kemungkinan reaksi balik dari warga sipil, mendapatkan dukungan lokal, dan berpotensi mengganggu upaya perekrutan organisasi ekstremis dengan menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi hak asasi manusia, Membangun kemitraan internasional: Penelitian mengenai sinkronisasi kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia sangat penting untuk membangun dan memperkuat kemitraan internasional. Negara-negara yang menunjukkan komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam operasi militernya kemungkinan besar akan dipandang sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam upaya militer bersama, misi kemanusiaan, dan operasi pemeliharaan perdamaian.

Secara keseluruhan, penelitian mengenai sinkronisasi kebijakan pertahanan dalam operasi militer dengan hak asasi manusia merupakan hal yang sangat mendesak. Hal ini tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak untuk melindungi warga sipil dan menegakkan kewajiban hukum internasional tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas, efektivitas, dan akuntabilitas jangka panjang dalam upaya militer.

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan artikel “Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia” antara lain informasi mengenai operasi militer, sinkronisasi komunikasi, dan kebijakan pertahanan. Berikut beberapa poin pentingnya, operasi militer adalah upaya manusia yang dilakukan dalam lingkungan operasional yang dinamis dan tidak menentu untuk mencapai suatu tujuan politik (Buckel, 2021; DoD OGC, 2015); Komandan, staf, dan bawahan memastikan bahwa keputusan dan tindakan mereka mematuhi undang-undang dan peraturan Amerika Serikat, internasional, dan, dalam beberapa kasus, negara tuan rumah yang berlaku (Buckel, 2021; DoD OGC, 2015); Sinkronisasi komunikasi penting dalam operasi militer, dan terdapat praktik, taktik, teknik, dan prosedur terbaik yang digunakan untuk menyinkronkan komunikasi (JDN 2-13, 2013); Panduan kebijakan pertahanan penting dalam operasi dan latihan militer (JP 3-0, 2011).

Tingkat kecanggihan dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dalam operasi militer dengan hak asasi manusia tidak terlihat jelas dari hasil penelusuran. Namun, terbukti bahwa permasalahan ini rumit dan memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan operasional dari permasalahan tersebut. Penelitian dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan pendekatan komprehensif yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam operasi militer sekaligus mencapai tujuan politik dari operasi tersebut.

Ketika negara-negara berusaha untuk menjamin keamanan dan kedaulatan mereka, kebijakan pertahanan memainkan peran penting dalam membentuk operasi militer. Namun, di era di mana penghormatan terhadap hak asasi manusia telah menjadi prioritas global, mencapai integrasi kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia secara simultan menghadirkan tantangan-tantangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rumusan masalah utama dan pertanyaan penelitian seputar sinkronisasi kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia dalam operasi militer. Permasalahannya terletak pada ketegangan yang melekat antara keharusan menjaga keamanan nasional dan sekaligus menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Operasi militer sering kali melibatkan dilema hak asasi manusia yang tidak dapat dihindari, seperti kerugian tambahan, korban sipil, dan pertemuan dengan aktor non-negara yang mengabaikan hukum kemanusiaan internasional. Tantangan-tantangan ini memerlukan pemahaman yang berbeda mengenai kompleksitas yang terlibat dalam sinkronisasi

kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa pertimbangan etis tidak dikesampingkan.

Mencapai sinkronisasi kebijakan pertahanan dalam operasi militer yang menghormati hak asasi manusia merupakan tugas kompleks yang memerlukan penelitian dan analisis komprehensif. Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang teridentifikasi dapat memandu eksplorasi lebih lanjut terhadap isu kritis ini, sehingga memungkinkan para pembuat kebijakan dan otoritas militer untuk mengembangkan strategi, mekanisme, dan kerangka kerja yang menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Mengatasi pertanyaan-pertanyaan ini dapat berkontribusi pada pendekatan yang lebih terinformasi dan etis terhadap operasi militer di abad ke-21, menjaga keamanan nasional serta martabat dan hak-hak semua individu yang terlibat.

Ketegangan yang melekat antara keamanan nasional dan hak asasi manusia mengharuskan adanya sinkronisasi kebijakan pertahanan dengan pertimbangan etis selama operasi militer. Dengan mencapai tujuan-tujuan penelitian yang diuraikan di atas, suatu pendekatan komprehensif dapat dikembangkan untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kebijakan pertahanan secara efektif. Mendorong perilaku etis, membangun mekanisme akuntabilitas, meningkatkan pelatihan dan pendidikan, dan membina kolaborasi internasional merupakan langkah-langkah penting dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan standar-standar hak asasi manusia. Dengan berfokus pada tujuan penelitian ini, para pembuat kebijakan, pemimpin militer, dan pemangku kepentingan dapat berupaya mencapai keseimbangan yang lebih harmonis antara kepentingan keamanan nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengatasi tantangan yang terkait dengan pemeliharaan keamanan nasional sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam operasi militer.

METODE

Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder, menurut Creswell (2014), untuk meneliti sinkronisasi kebijakan pertahanan dalam operasi militer dengan hak asasi manusia akan melibatkan analisis menyeluruh terhadap literatur, dokumen, laporan, dan informasi publik yang ada terkait dengan topik tersebut.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mensintesis data yang relevan dari sumber sekunder untuk menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melakukan penelitian kualitatif dengan data sekunder: (1) Desain penelitian: Definisikan dengan jelas tujuan dan pertanyaan penelitian dari penelitian tersebut. Tentukan ruang lingkup dan batasan penelitian, tentukan jangka waktu dan fokus geografis, (2) Identifikasi dan akses sumber data sekunder: Jelajahi berbagai sumber data sekunder yang mungkin mencakup jurnal akademis, buku, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, publikasi militer, laporan organisasi internasional, dan sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Manfaatkan pencarian kata kunci, database bibliografi, dan sumber daya online untuk menyusun daftar ekstensif sumber potensial, (3) Pemilihan dan evaluasi data: Evaluasi secara cermat setiap sumber data potensial berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan validitas untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Kecualikan sumber-sumber yang tidak dapat diandalkan atau ketinggalan jaman dan prioritaskan sumber-sumber yang telah melalui proses tinjauan sejawat ilmiah, (4) Pengumpulan data: Secara sistematis mengumpulkan data yang relevan dari sumber-sumber terpilih dengan menggali informasi penting, termasuk kerangka teoritis, kebijakan pertahanan, perjanjian hak asasi manusia, hukum internasional, studi kasus, praktik terbaik, dan bukti empiris terkait dengan sinkronisasi kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia dalam operasi militer. Memanfaatkan kutipan dan referensi untuk menjaga integritas dan ketertelusuran data, (5) Analisis data: Melakukan pembacaan mendalam dan interpretasi kritis terhadap data yang dikumpulkan. Gunakan teknik pengkodean tematik untuk mengidentifikasi pola umum, gagasan utama, dan tema yang muncul. Gunakan kerangka analitis dan perangkat lunak analisis data kualitatif, jika ada, untuk mengatur dan menganalisis data, (6) Mensintesis temuan: Meringkas, membandingkan, dan mengintegrasikan temuan-temuan utama dari berbagai sumber. Identifikasi kesenjangan, kontradiksi, dan area yang perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam literatur, lanskap kebijakan, atau praktik militer yang ada terkait dengan sinkronisasi kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia dalam operasi militer, (7) Interpretasi data: Menafsirkan temuan yang disintesis untuk menjawab tujuan dan pertanyaan penelitian. Mengembangkan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia dalam operasi militer. Perhatikan nuansa, kompleksitas, dan faktor kontekstual yang mungkin berdampak pada upaya sinkronisasi.

Gunakan teori, konsep, atau kerangka kerja yang relevan untuk mendukung interpretasi dan mengembangkan kesimpulan yang beralasan, (8) Penulisan laporan: Menyajikan temuan, analisis, dan interpretasi penelitian secara jelas, runtut, dan terstruktur dengan baik. Ikuti pedoman akademis yang sesuai untuk tinjauan literatur, termasuk kutipan dan referensi yang tepat. Memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan, praktisi militer, dan penelitian masa depan berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian.

Dalam melakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder, peneliti harus mematuhi pertimbangan etis dengan memberikan penghargaan yang pantas kepada penulis asli, menghormati undang-undang hak cipta, dan memastikan bahwa data digunakan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.

HASIL DAN DISKUSI

Mengembangkan Kerangka Kerja Terpadu: Menyeimbangkan Kebijakan Pertahanan dan Pertimbangan Hak Asasi Manusia

Kebijakan pertahanan berperan sebagai pilar penting dalam aparat keamanan suatu negara. Namun, kebijakan-kebijakan ini harus dikembangkan atau direvisi agar dapat mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia secara efektif. Pemerintah nasional harus mengadopsi kerangka kerja terbaru yang secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan pertahanan, menyeimbangkan prioritas keamanan nasional dengan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar (Fahner & Happold, 2019). Diskusi ini akan mengeksplorasi mekanisme yang dapat memfasilitasi harmonisasi tujuan-tujuan yang tampaknya bertolak belakang ini.

1. Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia ke dalam Kebijakan Pertahanan

- a. Kepatuhan Hukum dan Kebijakan: Langkah pertama dalam mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia adalah memastikan bahwa kebijakan pertahanan sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional (Carrasco et al., 2016). Dengan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam undang-undang dan kerangka kebijakan nasional, pemerintah menciptakan kerangka kerja yang mengikat secara hukum yang menjadi landasan bagi kepatuhan hak asasi manusia dalam operasi keamanan.
- Pengkajian Dampak Hak Asasi Manusia:** Melakukan pengkajian menyeluruh terhadap potensi dampak kebijakan pertahanan terhadap hak asasi manusia dapat secara efektif mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatian dan mencegah pelanggaran (BSR, 2013). Penilaian ini harus

dilakukan di semua tingkat pengembangan kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Ketika memasukkan penilaian dampak hak asasi manusia, kebijakan pertahanan dapat dimodifikasi secara proaktif untuk meminimalkan konsekuensi negatif.

- b. **Pelatihan dan Pendidikan:** Mendidik personel pertahanan mengenai standar hak asasi manusia internasional dan pertimbangan etis sangatlah penting. Program pelatihan harus meningkatkan kesadaran, meningkatkan empati, dan menanamkan rasa tanggung jawab sesuai dengan norma hak asasi manusia internasional (USSOUTHCOM, 2009). Pendekatan ini membantu menciptakan budaya saling menghormati dan memastikan bahwa pertimbangan hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam operasi pertahanan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran.
 - c. **Pemantauan dan Pengawasan Eksternal:** Membentuk badan-badan independen, seperti komisi hak asasi manusia atau ombudsman khusus, untuk mengawasi kebijakan pertahanan akan mendorong akuntabilitas. Entitas-entitas ini harus mempunyai kewenangan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di dalam angkatan pertahanan dan dengan demikian memberikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan. Pemantauan eksternal memastikan bahwa kebijakan pertahanan ditinjau dan direvisi secara berkala untuk memenuhi standar hak asasi manusia internasional (United Nations, 2009).
2. **Menyeimbangkan Keamanan Nasional dan Hak Asasi Manusia**
- a. **Penggunaan Kekuatan yang Proporsional:** Kebijakan pertahanan harus menekankan prinsip proporsionalitas, memastikan bahwa penggunaan kekuatan adalah perlu dan proporsional dengan ancaman yang dihadapi (Hamilton, 2006). Menetapkan pedoman yang jelas mengenai penggunaan kekuatan akan membantu mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia, menjamin perlindungan hak-hak dasar sekaligus menjaga keamanan yang efektif.
 - b. **Perlindungan terhadap Penahanan dan Penyiksaan Sewenang-wenang:** Menerapkan perlindungan terhadap penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang sangat penting untuk melindungi hak-hak individu selama operasi keamanan (Shelton, 2020). Menerapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk penahanan, memastikan akses cepat terhadap perwakilan hukum, dan

memberikan hak proses hukum kepada tahanan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia.

- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Kebijakan pertahanan yang efektif memerlukan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah harus mendorong dialog terbuka dengan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa masyarakat mendapat informasi yang baik tentang kebijakan pertahanan dan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan cara yang menghormati hak (Wezeman & Wezeman, 2014). Selain itu, pembentukan mekanisme untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan aparat pertahanan sangatlah diperlukan.
- d. **Kerja Sama Internasional:** Kerja sama internasional sangat penting untuk mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam penegakan hukum internasional, yang melibatkan dialog diplomatik dan kerja sama dengan badan-badan internasional seperti Bank Dunia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan memainkan peran penting dalam aparat keamanan suatu negara. Namun, penting bagi kebijakan-kebijakan ini untuk dikembangkan atau direvisi dengan cara yang mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia secara efektif. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk mengadopsi kerangka kerja terbaru yang secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan pertahanan, dengan memberikan keseimbangan antara prioritas keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia yang mendasar.

Penelitian ini menekankan perlunya menyelaraskan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dengan mengeksplorasi mekanisme yang memfasilitasi integrasi hak asasi manusia ke dalam kebijakan pertahanan. Hal ini termasuk memastikan bahwa kebijakan pertahanan mematuhi hukum hak asasi manusia internasional di semua tingkat pengembangan kebijakan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi. Program pelatihan direkomendasikan untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan empati, dan menanamkan rasa tanggung jawab sesuai dengan norma hak asasi manusia internasional. Ketika menyeimbangkan keamanan nasional dan hak asasi manusia, prinsip proporsionalitas menjadi hal yang sangat penting. Penggunaan kekerasan harus diperlukan dan proporsional dengan ancaman yang dihadapi, dan pedoman yang jelas mengenai penggunaannya dapat membantu mengurangi risiko pelanggaran hak asasi

manusia sekaligus menjaga keamanan yang efektif. Penelitian ini juga menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu selama operasi keamanan, khususnya terhadap penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan. Menerapkan aturan dan prosedur penahanan yang jelas, memastikan akses yang cepat terhadap perwakilan hukum, dan memberikan penahanan dengan hak-hak yang diproses secara hukum adalah hal yang penting untuk melindungi hak asasi manusia.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen kunci dari kebijakan pertahanan yang efektif. Proses pengambilan keputusan harus transparan, dan harus ada akuntabilitas atas setiap pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah didorong untuk terlibat dalam dialog terbuka dengan organisasi masyarakat sipil agar masyarakat mendapat informasi yang baik tentang kebijakan pertahanan dan memastikan penerapannya dengan cara yang menghormati hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, integrasi hak asasi manusia ke dalam kebijakan pertahanan sangat penting baik untuk perlindungan hak-hak dasar maupun pemeliharaan keamanan yang efektif. Dengan mengadopsi kerangka kerja terbaru yang menggabungkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas, negara-negara dapat mengembangkan kebijakan pertahanan yang mendorong keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Tantangan Etis Utama yang Dihadapi Pasukan Militer dalam Menjamin Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dan Hak Asasi Manusia Selama Operasi Militer

Dalam konflik-konflik masa kini, pasukan militer sering kali beroperasi di lingkungan yang kompleks di mana penegakan hak asasi manusia dan sinkronisasi kebijakan pertahanan dapat menimbulkan tantangan etika yang signifikan (Caton, 2015). Diskusi ini mengeksplorasi dilema praktis yang dihadapi personel militer ketika dihadapkan pada pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan etika yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, aturan keterlibatan, dan perlakuan terhadap tawanan perang, dan lain-lain.

1. Pengambilan Keputusan

- a. Kerusakan Tambahan: Operasi militer seringkali menimbulkan risiko kerugian yang tidak disengaja terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil (Martin &

Freeland, 2021). Menyeimbangkan kebutuhan untuk mencapai tujuan taktis sambil meminimalkan kerugian terhadap non-kombatan menimbulkan dilema etika yang signifikan bagi para pengambil keputusan militer.

- b. Kekuatan Pencegahan: Ketika dihadapkan pada potensi ancaman atau ketidakstabilan, kekuatan militer harus menilai implikasi etis dari penggunaan kekuatan untuk mencegah dampak buruk lebih lanjut, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas dan kebutuhan dibandingkan dengan pelestarian hak asasi manusia (SIRBU, 2023).

2. Aturan Keterlibatan

- a. Diskriminasi dan Proporsionalitas: Tantangan etis muncul ketika menentukan tingkat kekuatan yang diperlukan untuk merespons ancaman sekaligus membatasi kerugian terhadap non-kombatan (Sharkey, 2012). Memastikan kepatuhan yang ketat terhadap aturan keterlibatan, seperti prinsip diskriminasi, menjadi hal yang sangat penting untuk memitigasi pelanggaran hak asasi manusia.
- b. Perlindungan Warga Sipil: Identifikasi dan pembedaan antara kombatan dan warga sipil dalam peperangan asimetris bisa jadi bersifat ambigu. Penegakan hak asasi manusia memerlukan mekanisme prosedural yang ketat untuk mengurangi risiko jatuhnya korban sipil selama aksi militer (Sewall et al., 2010).

3. Perlakuan terhadap Tawanan Perang

- a. Interogasi dan Penyiksaan: Perlakuan etis terhadap tawanan perang menimbulkan tantangan yang kompleks bagi pasukan militer. Menyeimbangkan kebutuhan akan informasi dengan larangan penyiksaan dan perlakuan kejam memerlukan kepatuhan terhadap standar yang diakui secara internasional, seperti Konvensi Jenewa (Greenberg, 2015).
- b. Penahanan tanpa Pengadilan: Pasukan militer mungkin menghadapi dilema etika ketika menahan seseorang untuk jangka waktu yang lama tanpa pengadilan. Mencapai keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan memastikan perlindungan hak asasi manusia melalui proses peradilan yang adil sangatlah penting (Jacobson, 2021).

4. Akuntabilitas dan Transparansi

- a. Memastikan Akuntabilitas: Pasukan militer harus membentuk mekanisme pengawasan yang kuat untuk menyelidiki dan menangani setiap kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh personel mereka. Hal ini termasuk meminta

pertanggungjawaban individu dan menerapkan langkah-langkah perbaikan dengan cepat (Buchanan & Keohane, 2015).

- b. **Transparansi dan Keterlibatan:** Tantangan etika muncul dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas publik. Meningkatkan komunikasi, melibatkan masyarakat lokal, dan membangun mekanisme ganti rugi merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan komitmen dalam menegakkan hak asasi manusia selama operasi militer (Colli & Reykers, 2023).

Hasil penelitian tantangan etika utama yang dihadapi kekuatan militer dalam memastikan sinkronisasi kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia selama operasi militer dalam konflik saat ini adalah:

1. **Pengambilan keputusan:** Para pengambil keputusan militer menghadapi dilema etika dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk mencapai tujuan taktis dengan meminimalkan kerugian terhadap non-kombatan, terutama dalam hal kerusakan tambahan dan penggunaan kekuatan preventif.
2. **Aturan keterlibatan:** Menentukan tingkat kekuatan yang diperlukan untuk menanggapi ancaman dan membatasi kerugian terhadap non-kombatan merupakan tantangan etis. Penegakan hak asasi manusia memerlukan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip diskriminasi dan proporsionalitas, serta perlindungan terhadap warga sipil dalam peperangan asimetris.
3. **Perlakuan terhadap tawanan perang:** Perlakuan etis terhadap tawanan perang menghadirkan tantangan yang kompleks. Menyeimbangkan kebutuhan akan informasi dengan larangan penyiksaan dan perlakuan kejam memerlukan kepatuhan terhadap standar yang diakui secara internasional, seperti Konvensi Jenewa. Selain itu, menahan individu tanpa pengadilan akan menimbulkan dilema etika dalam menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dan memastikan proses peradilan yang adil.
4. **Akuntabilitas dan transparansi:** Membangun mekanisme pengawasan yang kuat untuk menyelidiki dan menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh personel militer sangatlah penting. Menjaga akuntabilitas individu dan menerapkan langkah-langkah perbaikan dengan segera sangatlah penting. Selain itu, menjaga kepercayaan dan kredibilitas publik dengan meningkatkan komunikasi, melibatkan masyarakat lokal, dan membangun mekanisme ganti rugi sangat penting dalam menegakkan hak asasi manusia selama operasi militer.

Secara keseluruhan, memastikan sinkronisasi kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia dalam operasi militer memerlukan penanganan tantangan etika ini melalui pengambilan keputusan, aturan keterlibatan, perlakuan terhadap tawanan perang, akuntabilitas, dan transparansi.

Meningkatkan Pelatihan dan Pendidikan Militer untuk menyadarkan Personil akan Pentingnya Hak Asasi Manusia dalam Operasi Militer

Operasi militer pada dasarnya melibatkan situasi kompleks dengan pertaruhan besar, seringkali mengharuskan personel untuk mengambil keputusan sulit di lingkungan yang tidak bersahabat. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memastikan bahwa program pelatihan dan pendidikan militer memasukkan norma-norma hak asasi manusia untuk memungkinkan personel menavigasi konflik secara efektif sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar martabat manusia (Titko et al., 2021). Diskusi ini akan mengeksplorasi perlunya memasukkan modul-modul hak asasi manusia ke dalam kurikulum militer, mempromosikan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di kalangan personel militer, dan menumbuhkan kesadaran akan hukum kemanusiaan internasional.

1. Memasukkan Modul Hak Asasi Manusia ke dalam Kurikulum Militer

Untuk menyadarkan personel militer mengenai pentingnya hak asasi manusia, penting untuk mengintegrasikan modul-modul hak asasi manusia ke dalam program pelatihan dan pendidikan militer (Terziev et al., 2017a). Modul-modul ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hukum hak asasi manusia internasional, dengan fokus pada relevansi norma-norma tersebut dalam berbagai konteks operasional. Kursus-kursus ini dapat mencakup mata pelajaran seperti Universal Declaration of Human Rights, Geneva Conventions, dan perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan. Memasukkan studi kasus dan latihan praktis ke dalam kurikulum dapat meningkatkan kemampuan personel untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam situasi kehidupan nyata, sehingga menumbuhkan rasa hormat yang lebih besar terhadap hak asasi manusia dalam operasi militer.

2. Mempromosikan Budaya Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

Menciptakan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di kalangan militer sangat penting agar personel memahami pentingnya menjunjung prinsip-prinsip ini

dalam operasi mereka. Hal ini memerlukan pengembangan pendekatan pelatihan komprehensif yang menekankan pengambilan keputusan yang etis dan mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai nilai inti profesionalisme militer (Milton, 2018). Mendorong diskusi, melibatkan personel dalam latihan berpikir kritis, dan mengevaluasi dilema etika dalam skenario militer dapat membantu menumbuhkan pola pikir yang memprioritaskan hak asasi manusia, bahkan dalam situasi yang menantang. Budaya hormat ini dapat meresap ke seluruh jajaran, yang menunjukkan komitmen kepemimpinan militer dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

3. Menumbuhkan Kesadaran akan Hukum Humaniter Internasional

Selain hak asasi manusia, personel militer harus menguasai hukum kemanusiaan internasional untuk memastikan legalitas dan etika pelaksanaan operasi militer. Program pelatihan dan pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip perbedaan, proporsionalitas, dan kebutuhan, yang menentukan batas-batas tindakan militer selama konflik bersenjata. Mendidik personel tentang implikasi etis dari tindakan mereka, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan sipil, dapat memberikan kontribusi besar terhadap pencegahan pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer. Pembaruan berkala terhadap hukum kemanusiaan internasional yang terus berkembang, melalui lokakarya dan seminar, akan menjamin bahwa personel tetap mendapat informasi dan diperlengkapi untuk menerapkan prinsip-prinsip ini selama bertugas (Burkle et al., 2019).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatkan pelatihan dan pendidikan militer sangat penting untuk menyadarkan personel akan pentingnya hak asasi manusia dalam operasi militer. Dengan memasukkan modul hak asasi manusia ke dalam kurikulum militer, personel dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum hak asasi manusia internasional dan relevansinya dalam berbagai konteks operasional. Studi kasus dan latihan praktis dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam situasi kehidupan nyata.

Menciptakan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di kalangan militer sangatlah penting. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan komprehensif yang menekankan pengambilan keputusan yang etis dan mempertimbangkan hak asasi manusia sebagai nilai inti profesionalisme militer. Melibatkan personel dalam latihan berpikir kritis dan mengevaluasi dilema etika dalam skenario militer dapat membantu

menumbuhkan pola pikir yang memprioritaskan hak asasi manusia, bahkan dalam situasi yang menantang.

Selain hak asasi manusia, personel militer harus memahami hukum humaniter internasional untuk memastikan legalitas dan etika operasi militer. Program pelatihan harus mendidik personel tentang implikasi etis dari tindakan mereka, khususnya mengenai perlindungan warga sipil. Pembaruan rutin terhadap hukum humaniter internasional yang terus berkembang melalui lokakarya dan seminar akan memastikan bahwa personel tetap mendapat informasi dan diperlengkapi untuk menerapkan prinsip-prinsip ini saat bertugas.

Kerangka Hukum dan Kelembagaan untuk Akuntabilitas dalam Operasi Militer: Menjamin Keadilan dan Mencegah Impunitas atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Operasi militer baik di tingkat domestik maupun internasional sering kali mengandung potensi pelanggaran hak asasi manusia. Untuk membangun akuntabilitas atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, penting untuk memiliki kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat yang memandu penuntutan dan hukuman terhadap individu yang bertanggung jawab (Skaar et al., 2016). Diskusi ini mengeksplorasi mekanisme hukum utama, termasuk konvensi internasional, perundang-undangan dalam negeri, dan prosedur kelembagaan, yang memainkan peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia, menjamin keadilan, dan mencegah impunitas dalam operasi militer.

1. Konvensi Internasional

Konvensi internasional memberikan kerangka penting untuk menetapkan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer (Gibson, 2008). Yang utama di antaranya adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan yang diadopsi pada tahun 1977, yang menetapkan peraturan komprehensif yang mengatur pelaksanaan konflik bersenjata. Konvensi-konvensi ini mendefinisikan serangkaian hak dan kewajiban bagi aktor negara dan non-negara serta menetapkan akuntabilitas hukum atas pelanggaran yang terjadi. Khususnya, pelanggaran yang dilakukan selama operasi militer, seperti penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan kekerasan seksual, dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum internasional (Karska, 2016). Selain itu, konvensi-konvensi seperti Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading

Treatment or Punishment and the International Covenant on Civil and Political Rights masing-masing memperkuat akuntabilitas melalui pelarangan penyiksaan dan hak atas peradilan yang adil (Bletter, 2003). Dengan meratifikasi konvensi-konvensi ini, negara-negara berkomitmen untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mereka ke dalam undang-undang domestik, sehingga memperkuat akuntabilitas di dalam negeri atas pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer.

2. Peraturan Perundang-undangan Dalam Negeri

Menetapkan undang-undang nasional yang sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional merupakan aspek penting lainnya untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang dalam negeri harus secara jelas mendefinisikan kejahatan, hukuman yang dikenakan, dan mekanisme keadilan dalam operasi militer. Dengan menguraikan tanggung jawab dan akuntabilitas individu, undang-undang domestik menetapkan landasan hukum untuk mengadili dan menghukum para pelaku (Borelli, 2013). Misalnya, memasukkan tindakan-tindakan seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida ke dalam hukum pidana dalam negeri secara eksplisit menetapkan akuntabilitas individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang domestik menghormati hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, seperti hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan jaminan peradilan yang adil, untuk mencegah potensi pelanggaran dan impunitas.

3. Prosedur Kelembagaan

Prosedur kelembagaan mencakup mekanisme domestik dan internasional yang memainkan peran penting dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer. Membangun institusi yang mampu dan tidak memihak yang berdedikasi untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah impunitas. Di tingkat domestik, pembentukan lembaga peradilan yang independen, kantor kejaksaan, dan pengadilan militer dapat berkontribusi terhadap akuntabilitas. Lembaga-lembaga ini harus memiliki staf, pelatihan, dan pemberdayaan yang memadai untuk menyelidiki tuduhan, mengadili pelanggar, dan memberikan penilaian yang adil dan tidak memihak. Dimasukkannya pengawasan sipil dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang independen dapat semakin memperkuat mekanisme akuntabilitas. Di tingkat internasional, International Criminal Court (ICC)

berfungsi sebagai lembaga penting untuk meminta pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional yang paling serius (Cassese, 2011). ICC menyelidiki dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keberadaannya memberikan lapisan akuntabilitas tambahan di luar mekanisme domestik dan memberikan efek jera bagi calon pelaku. Selain itu, komisi kebenaran, program reparasi, dan kerangka dukungan korban dapat melengkapi akuntabilitas peradilan dengan mengakui pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, memfasilitasi rekonsiliasi, dan memberikan ganti rugi kepada korban dan masyarakat yang terkena dampak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum dan kelembagaan untuk akuntabilitas dalam operasi militer sangat penting untuk menjamin keadilan dan mencegah impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Kerangka kerja ini mencakup konvensi internasional, perundang-undangan domestik, dan prosedur kelembagaan. Berikut beberapa temuan penting dari hasil pencarian:

1. Konvensi Internasional: Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan yang diadopsi pada tahun 1977 menetapkan peraturan komprehensif yang mengatur pelaksanaan konflik bersenjata. Konvensi-konvensi ini mendefinisikan serangkaian hak dan kewajiban bagi aktor negara dan non-negara serta menetapkan akuntabilitas hukum atas pelanggaran yang terjadi. Konvensi lain, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, memperkuat akuntabilitas melalui pelarangan penyiksaan dan hak atas peradilan yang adil (Carswell et al., 2013; United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights., 2011).
2. Perundang-undangan Domestik: Menetapkan undang-undang nasional yang sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional merupakan aspek penting lainnya untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia. Undang-undang dalam negeri harus secara jelas mendefinisikan kejahatan, hukuman yang dijatuhkan, dan mekanisme peradilan dalam operasi militer. Dengan menguraikan tanggung jawab dan akuntabilitas individu, undang-undang domestik menetapkan dasar hukum untuk mengadili dan menghukum pelaku (Carswell et al., 2013; Greenwood, 2000).
3. Prosedur Kelembagaan: Prosedur kelembagaan mencakup mekanisme domestik dan internasional yang memainkan peran penting dalam menangani pelanggaran hak asasi

manusia selama operasi militer. Membangun institusi yang mampu dan tidak memihak yang berdedikasi untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas sangat penting untuk mencegah impunitas (Carswell et al., 2013; United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights., 2011).

Secara keseluruhan, kerangka hukum dan kelembagaan untuk akuntabilitas operasi militer bersifat kompleks dan memiliki banyak segi. Hal ini memerlukan kombinasi konvensi internasional, undang-undang domestik, dan prosedur kelembagaan untuk menjamin keadilan dan mencegah impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia.

Kolaborasi dan Kerja Sama Internasional: Harmonisasi Kebijakan Pertahanan dengan Hak Asasi Manusia dalam Operasi Militer

Harmonisasi kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia dalam operasi militer merupakan tugas kompleks yang memerlukan kolaborasi dan kerja sama internasional antar negara (Terziev et al., 2017b). Diskusi ini mengeksplorasi relevansi dan potensi kolaborasi tersebut dalam mengatasi secara efektif tantangan-tantangan yang ada dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia. Konferensi ini akan menyoroti pentingnya kerangka kerja dan aliansi multilateral dalam mendorong praktik terbaik dan tanggung jawab bersama antar negara.

1. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran

Kolaborasi internasional memberikan peluang bagi negara-negara untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai kompleksitas yang terlibat dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia (Manurung et al., 2023). Dengan bertukar wawasan, pengalaman, dan pengetahuan, negara-negara memperoleh kesadaran akan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi selama operasi militer. Pemahaman bersama ini mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi dan pengembangan kebijakan pertahanan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia.

2. Perkembangan Standar Internasional

Kerja sama internasional memungkinkan pengembangan standar universal yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam operasi militer. Upaya kolaboratif memungkinkan negara-negara untuk secara kolektif menetapkan pedoman, konvensi, dan perjanjian yang menetapkan harapan yang jelas bagi semua pihak yang berpartisipasi (Mituletu-Buica, 2015). Misalnya, dalam kerangka PBB,

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenewa berperan sebagai instrumen penting dalam melindungi hak asasi manusia selama konflik bersenjata.

3. Berbagi Praktik Terbaik

Kolaborasi dan kerja sama internasional memfasilitasi pertukaran praktik terbaik dalam kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia (Khorram-Manesh et al., 2022). Melalui forum, pertemuan puncak, dan inisiatif, negara-negara dapat bertukar strategi dan metodologi yang telah terbukti efektif dalam meminimalkan potensi pelanggaran. Pengetahuan bersama ini mendorong pembelajaran berkelanjutan dan membantu negara-negara menyelaraskan kebijakan pertahanan mereka dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga mengurangi risiko kerugian terhadap warga sipil selama operasi militer.

4. Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan

Sinkronisasi kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia yang efisien memerlukan personel militer yang terlatih dan terampil. Kerjasama internasional memungkinkan negara-negara untuk mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kemampuan angkatan bersenjata mereka dalam melakukan operasi sambil menjunjung tinggi hak asasi manusia (Tardy, 2018). Kolaborasi ini mendorong keseragaman metode pelatihan, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan memitigasi potensi pelanggaran.

5. Proses Pengambilan Keputusan Multilateral

Kolaborasi dan kerja sama internasional menyediakan landasan bagi proses pengambilan keputusan multilateral, memastikan bahwa kebijakan pertahanan memprioritaskan pertimbangan hak asasi manusia (Dipua et al., 2021). Melalui aliansi seperti NATO atau organisasi regional, negara dapat berpartisipasi dalam diskusi yang mengkaji dan menilai kebijakan pertahanan agar selaras dengan kerangka hak asasi manusia. Proses-proses tersebut mendorong transparansi, akuntabilitas, dan rasa saling percaya di antara negara-negara sambil menjunjung tinggi hak-hak individu yang terkena dampak operasi militer.

6. Mekanisme Pemantauan dan Akuntabilitas Bersama

Kolaborasi internasional memungkinkan pembentukan mekanisme pemantauan dan akuntabilitas bersama, yang memfasilitasi penilaian kepatuhan kebijakan pertahanan terhadap standar hak asasi manusia. Mekanisme-mekanisme ini memberikan jalan bagi negara-negara untuk berkolaborasi dalam memverifikasi dan menangani potensi

pelanggaran, sehingga menekankan tanggung jawab bersama dalam menegakkan hak asasi manusia selama operasi militer. Dengan saling menjaga akuntabilitas, kolaborasi internasional mendorong budaya tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hasil penelitian menyoroti kolaborasi dan kerja sama internasional sangat penting dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia dalam operasi militer. Hal ini memungkinkan peningkatan pemahaman dan kesadaran akan kompleksitas yang terlibat dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang terinformasi dan pengembangan kebijakan pertahanan yang komprehensif dan berbasis hak asasi manusia. Kerja sama internasional juga memfasilitasi pertukaran praktik terbaik dalam kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia, mendorong pembelajaran berkelanjutan dan mengurangi risiko kerugian terhadap warga sipil selama operasi militer. Peningkatan kapasitas dan pelatihan sangat penting untuk sinkronisasi kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia yang efisien, yang memerlukan personel militer yang terlatih. Proses pengambilan keputusan multilateral, seperti NATO atau organisasi regional, mendorong transparansi, akuntabilitas, dan rasa saling percaya antar negara sambil menjunjung tinggi hak-hak individu yang terkena dampak operasi militer. Mekanisme pemantauan dan akuntabilitas bersama juga dibentuk untuk memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Kebijakan pertahanan harus dikembangkan dan direvisi untuk menyeimbangkan keamanan nasional dengan hak asasi manusia. Mekanisme seperti kepatuhan hukum, penilaian dampak, pelatihan, pemantauan, penggunaan kekuatan secara proporsional, perlindungan terhadap penyiksaan, transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama internasional dapat membantu mencapai keseimbangan ini. Pasukan militer menghadapi tantangan etis dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia, memerlukan pengambilan keputusan yang hati-hati, aturan keterlibatan yang ketat, perlakuan etis terhadap tahanan, akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat untuk meminimalkan pelanggaran hak asasi manusia dan mencapai tujuan. Meningkatkan pelatihan militer dan pendidikan mengenai hak asasi manusia sangat penting untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan melindungi warga sipil di zona konflik.

Mengintegrasikan modul hak asasi manusia, menumbuhkan budaya saling menghormati, dan mengembangkan kesadaran akan hukum humaniter internasional berkontribusi terhadap dunia yang lebih aman. Akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer sangat penting demi keadilan, mencegah impunitas, dan menjunjung tinggi martabat. Kerangka hukum yang komprehensif, menggabungkan konvensi internasional, undang-undang domestik, dan prosedur kelembagaan, menjamin lingkungan yang lebih aman. Kerja sama internasional sangat penting untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia dalam operasi militer. Hal ini melibatkan pemahaman, pengembangan standar, pertukaran praktik terbaik, peningkatan kapasitas, pengambilan keputusan multilateral, dan akuntabilitas bersama.

REFERENSI

- Abrahamsen, R., & Sandor, A. (2018). The global South and international security. *The Oxford Handbook of International Security*, 1–18.
- Bletter, G. (2003). Israel's Impunity under International Law. *Peace Review*, 15(1), 3–9.
- Borelli, S. (2013). Domestic investigation and prosecution of atrocities committed during military operations: The impact of judgments of the European Court of Human Rights. *Israel Law Review*, 46(3), 369–404.
- BSR. (2013). *Conducting an Effective Human Rights Impact Assessment Guidelines, Steps, and Examples*. www.bsr.org.
- Buchanan, A., & Keohane, R. O. (2015). Toward a drone accountability regime. *Ethics & International Affairs*, 29(1), 15–37.
- Buckel, C. (2021). *A New Look at Operational Art: How We View War Dictates How We Fight It*. https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-100/jfq-100_94-100_Buckel.pdf?ver=4oFQDgl4E7nw3ASD63eEqw%3d%3d.
- Burkle, F. M., Kushner, A. L., Giannou, C., Paterson, M. A., Wren, S. M., & Burnham, G. (2019). Health care providers in war and armed conflict: Operational and educational challenges in international humanitarian law and the Geneva conventions, part II. Educational and training initiatives. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 13(3), 383–396.
- Carrasco, C. M., Muguruza, C. C., & Sánchez, R. A. (2016). Case Study: Common Security and Defence Policy (CSDP). *Brussels: European Commission*, 31.
- Carswell, A. J., Abbott, K., & Croix-Rouge, C. international de la. (2013). *Handbook on international rules governing military operations*.

- Cassese, A. (2011). *International criminal law: cases and commentary*. Oxford University Press.
- Caton, J. L. (2015). *Autonomous weapon systems: A brief survey of developmental, operational, legal, and ethical issues*.
- Colli, F., & Reykers, Y. (2023). Enemies or allies? How NGOs can push the military towards transparency around the use of force. *European Journal of International Security*, 8(1), 70–88.
- Cook, A. D. B., & Yogendran, S. (2021). Conceptualising humanitarian civil-military partnerships in the Asia-Pacific:(Re-) ordering cooperation. In *East Asia, Peacekeeping Operations, and Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (pp. 35–53). Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dipua, A., Harahap, N., Puspitawati, D., Aminuddin, F., & Prakoso, L. Y. (2021). Sea defense strategy the Indonesian navy in dealing with the South China Sea Conflict. *Italienisch*, 11(2), 120–126.
- DoD OGC. (2015). *DoD Law of War Manual - June 2015 Updated Dec 2016*.
- Donelli, F. (2023). From humanitarianism to drones: the pragmatic flexibility of Turkey's policy toward Sub-Saharan Africa. *Federico Donelli (2023), 'From Humanitarianism to Drones: The Pragmatic Flexibility of Turkey's Policy toward Sub-Saharan Africa', Poliarchie*, 6(1), 4–21.
- Fahner, J. H., & Happold, M. (2019). The human rights defence in international investment arbitration: exploring the limits of systemic integration. *International & Comparative Law Quarterly*, 68(3), 741–759.
- Gibson, M. R. (2008). International human rights law and the administration of justice through military tribunals: Preserving utility while precluding impunity. *J. Int'l L & Int'l Rel.*, 4, 1.
- Greenberg, I. (2015). From surveillance to torture: The evolution of US interrogation practices during the War on Terror. *Security Journal*, 28, 165–183.
- Greenwood, C. (2000). International Law and the Conduct of Military Operations: Stocktaking at the Start of a New Millenium. *International Law Studies*, 75(1), 17.
- Hamilton, J. (2006, August). *The Delicate Balance Between Civil Liberties and National Security*. South African Judges Commission.
- Jacobson, K. F. (2021). Pandora, We Have Found You-And You Came from Guantanamo Bay: How the Legal Legacy of Global War on Terror Detention Operations at

Guantanamo Bay May Impact the Future Detention of Prisoners of War and a Proposed Means to Respond. *Belmont L. Rev.*, 9, 1.

JDN 2-13. (2013). *Commander's Communication Synchronization Joint Doctrine Note 2-13*. https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/jdn_jg/jdn2_13.pdf.

JP 3-0. (2011). *JP 3-0, Joint Operations*. <https://www.moore.army.mil/mssp/security%20topics/Potential%20Adversaries/content/pdf/JP%203-0.pdf/>

Karska, E. (2016). Human rights violations committed by private military and security companies: an international law analysis. *Espaço Jurídico: Journal of Law*, 17(3), 753–766.

Khorram-Manesh, A., Mortelmans, L. J., Robinson, Y., Burkle, F. M., & Goniewicz, K. (2022). Civilian-military collaboration before and during Covid-19 pandemic—A systematic review and a pilot survey among practitioners. *Sustainability*, 14(2), 624.

Manurung, Y. S., Maarif, S., Toruan, T. S. L., & Swastanto, Y. (2023). Civil-Military Collaborative Governance Model in Natural Disaster Management in National Defense Policy. *Journal of Namibian Studies: History Politics Culture*, 33, 176–191.

Martin, A.-S., & Freeland, S. (2021). The advent of artificial intelligence in space activities: New legal challenges. *Space Policy*, 55, 101408.

Milton, C. E. (2018). *Conflicted memory: Military cultural interventions and the human rights era in Peru*. University of Wisconsin Pres.

Mituletu-Buica, F.-C. (2015). The International Legal Cooperation of the Application and Compliance of the International Humanitarian Law. *International Scientific Conference "Strategies XXI"*, 2, 278.

Sewall, S. B., Raymond, D., Chin, S., & Kardos, J. (2010). *MARO: Mass atrocity response operations: A military planning handbook*. Carr Center for Human Rights Policy, Harvard Kennedy School.

Sharkey, N. E. (2012). The inevitability of autonomous robot warfare. *International Review of the Red Cross*, 94(886), 787–799.

Shelton, D. L. (2020). *Advanced introduction to international human rights law*. Edward Elgar Publishing.

SÎRBU, L. (2023). Legal and ethical aspects of the synchronization of military and non-military activities in multi-domain operations. *Bulletin Of "Carol I" National Defence University*, 12(1), 163–171.

Skaar, E., García-Godos, J., & Collins, C. (2016). *Transitional justice in Latin America: the uneven road from impunity towards accountability*. Routledge.

- Tardy, T. (2018). Does European defence really matter? Fortunes and misfortunes of the Common Security and Defence Policy. *European Security*, 27(2), 119–137.
- Terziev, V., Madanski, V., & Kanev, D. (2017a). Entry opportunities in the bulgarian military-educational system and ensuring of civil rights. *Proceedings of SOCIOINT*.
- Terziev, V., Madanski, V., & Kanev, D. (2017b). Entry opportunities in the bulgarian military-educational system and ensuring of civil rights. *Proceedings of SOCIOINT*.
- Titko, E., Kurovska, I., Korniienko, P., Balzhyk, I. A., & Stoyatska, G. M. (2021). Military-civil interaction through the prism of human rights protection: the experience of the ECtHR. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 649–666.
- United Nations. (2009, August). *UN human rights experts encouraged by US Government efforts to increase oversight and accountability over private security contractors but concerned by gaps in access to effective remedy for victims of human rights violations*. UN Human Rights.
- United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. (2011). *International legal protection of human rights in armed conflict*. United Nations.
- Ussouthcom. (2009). *Unclassified for General Officers And Flag Officers Human Rights Awareness Education*.
- Valayden, D. (2020). The Littoral Combat Ship, or the Designs of Liquid Sovereignty. *Writing Beyond the State: Post-Sovereign Approaches to Human Rights in Literary Studies*, 155–174.
- Wezeman, P. D., & Wezeman, S. T. (2014, January 29). *Balancing transparency and national security*. SIPRI. <https://www.sipri.org/node/405>.
- Yamashita, H. (2015). New humanitarianism and changing logics of the political in international relations. *Millennium*, 43(2), 411–428.